



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Jumat 15 September 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI

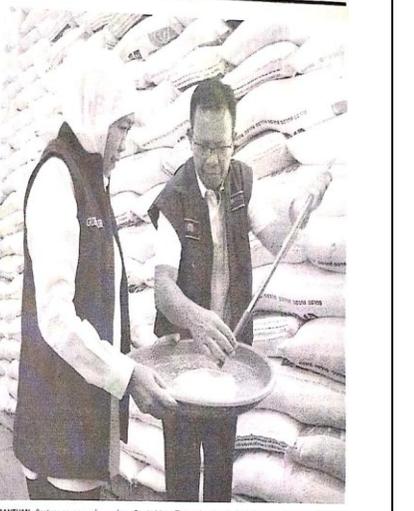
Bahas APBD 2024, DPRD Minta Fokus Tuntaskan 17 Program Prioritas



KOTA Badan Anggaran DPRD Sidoarjo menggelar rapat pembahasan anggaran APBD 2024...

86.720 Warga Miskin Sidoarjo Akan Terima Bantuan Pangan

Cadangan Provinsi Jatim Tahap II



Sidoarjo, Memo X Bantuan pangan cadangan beras Provinsi Jawa Timur tahap II mulai disalurkan...

Namun 200.000 KPM masih dalam proses verifikasi. Pihaknya berharap proses verifikasi dari Kementerian Sosial itu cepat selesai...

KILAS BIROKRASI

Sepuluh Pejabat Sidoarjo Mendaftar JPT Pratama Isi 5 Jabatan Kosong

Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 10 orang pejabat di Pemkab Sidoarjo, untuk sementara, pada Kamis (14/9) sore kemarin, sudah mengirimi pendaftaran untuk mengisi 5 posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Sidoarjo...

Flyover Tak Ada Lahan, Ajukan Underpass untuk Gedangan

Akhir Tahun Ini Lakukan Studi Kelayakan

SIDOARJO - Perempatan Gedangan menjadi salah satu titik kemacetan di Sidoarjo. Karena itu, pemerintah pusat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi berencana membangun flyover di Gedangan...



Pemdes Ketimang Gelar Musrenbangdes

Sidoarjo, Musrenbangdes Musrenbangdes perencanaan pembangunan desa tingkat kecamatan digelar di Desa Ketimang, Kecamatan Wonomulyo, Selasa (12/9) kemarin...

Buka Seleksi Lagi, Isi Posisi Kepala OPD yang Kosong

KOTA-Kesempatan untuk mengisi beberapa kursi kosong pada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali terbuka. Pemkab Sidoarjo menggelar lagi seleksi penerimaan pendaftaran JPT Pratama...

Pemdes Simpang Bagian BLT- DD Tiga Tahap

Sidoarjo, Musrenbangdes Pemerintah Desa Simpang, Kecamatan Perak, Selasa (12/9) kemarin menggelar Musrenbangdes...

Bahas APBD 2024, DPRD Minta Fokus Tuntaskan 17 Program Prioritas



USMAN
Ketua DPRD Sidoarjo



AGIL EFFENDI
Anggota Banggar



DISKUSI: Suasana rapat paripurna dengan agenda pembahasan raperda APBD 2024.

KOTA-Badan Anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo menyampaikan laporan terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2024. Dalam penyampaiannya, juru bicara banggar Agil Effendi menjelaskan beberapa poin penting mengenai rencana anggaran untuk tahun depan.

Anggaran pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 4,61 triliun. Sementara itu, anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,3 triliun. Angka tersebut Sedangkan pembiayaan Rp 350 miliar.

Agil menyebutkan, tahun depan adalah tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu, APBD 2024 diarahkan untuk menuntaskan 17 program prioritas yang belum tercapai. Banggar meminta pemkab untuk meninjau ulang anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan program-program prioritas tersebut. "Sehingga dipastikan semua program tuntas tahun depan," ujarnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), banggar juga berharap penggunaan sistem

online untuk pajak dan retribusi digencarkan. Tak hanya itu, dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diperlukan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan gedung galeri UMKM. "Langkah dapat menjadi wadah promosi bagi produk

UMKM di Sidoarjo," imbuh Agil.

Selain itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman juga menyebutkan perlunya ada upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan, permukiman, serta penanganan sampah terpadu juga menjadi prioritas dalam rencana pemba-

ngunan tahun depan. Dia menekankan pentingnya aspek lingkungan dalam pengembangan infrastruktur. Sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat. "Tentunya sambil tetap memperhatikan dampak lingkungan," tambahnya. Pemerintah daerah juga di-

minta berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar, ketahanan pangan, dan energi berkelanjutan. Dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar, pangan, dan energi yang berkelanjutan.

• Ka Halaman 10



Bahas APBD 2024,...

Dalam rencana anggaran tahun depan, pihaknya berharap ada perhatian serius terhadap aspek pemilu. Ada dana khusus untuk memenuhi kebutuhan pemilu, serta memastikan jalannya proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik. Di sisi upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat, dibutuhkan penambahan program dan kegiatan untuk penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan. Peningkatan alokasi anggaran juga diberikan pada program jambanisasi dan pemberian makan tambahan, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, poin penting yang termuat dalam RKUA-

PPAS 2024 adalah kesepakatan legislatif untuk membangun gedung diagnostik terpadu di RSUD Sidoarjo dengan menggunakan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan. Langkah itu diharapkan dapat menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Diharapkan, laporan penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 tersebut menandai komitmen legislatif dalam mengarahkan anggaran ke arah yang efektif dan efisien. Serta berfokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembahasan tentang rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2024 berlanjut. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor mengungkapkan rencana pembangunan daerah dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, tema utama pembangunan tahun depan adalah "Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis

sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi Inklusif". Muhdor berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdor tersebut menjelaskan, salah satu prioritas utama dalam pembangunan 2024 adalah penataan kota dan sistem terpadu pengurai kemacetan.

Menurut dia, itu merupakan langkah penting untuk meningkatkan mobilitas di Sidoarjo. Juga ada rencana untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, sehingga kemacetan dapat diurai efektif. "Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Selaras dengan semangat lokal, rencana pembangunan juga mencakup revitalisasi nilai budaya lokal sebagai spirit pendukung pembangunan daerah. Gus Muhdor mengakui pentingnya memper-

tahankan warisan budaya dan menjadikannya sebagai faktor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah Sidoarjo juga akan mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta mendukung usaha mikro, koperasi, industri kreatif, dan pariwisata. "Dampaknya, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran melalui upaya ini," katanya.

Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter juga menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan ditingkatkan. Sehingga tercipta suasana yang setara, toleran, tertib, dan nyaman, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam pembangunan daerah. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

86.720 Warga Miskin Sidoarjo Akan Terima Bantuan Pangan

Cadangan Provinsi Jatim Tahap II

Sidoarjo, Memo X

Bantuan pangan cadangan beras Provinsi Jawa Timur tahap II mulai disalurkan. Bantuan itu diluncurkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/09/2023) sore.

Terdapat 3,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Timur yang akan memperoleh bantuan itu. Mereka memperoleh 10 kilogram beras setiap bulannya selama tiga bulan. Mulai bulan September, Oktober dan November. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat 86.720 KPM.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Ny Khofifah Indar Parawansa mengatakan 34.000 ton beras akan didistribusikan setiap bulan. Pendistribusian dilakukan di bulan September, Oktober dan November. Dengan demikian terdapat 102.000 ton beras yang disalurkan kepada 3,2 juta KPM di seluruh Jawa Timur.

"Kami berharap ketika hari

ini mulai didistribusikan 34.000 ton untuk 3,2 juta KPM, maka akan memberi bantalan sosial bagi KPM. Sekaligus bisa memberi penetrasi harga beras di pasar, terutama untuk beras dengan kualitas medium," ujar Khofifah Indar Parawansa, Rabu (13/09/2023) sore.

Selain itu, Khofifah menjelaskan kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) terjadi di semua wilayah Indonesia. Faktornya, karena kenaikan harga Gabah Kering Giling (GKG) dan harga Gabah Kering Panen (GKP). Karena itu, harga beras di penggilingan sudah di atas HET. Namun harga beras premium dan medium di Jatim masih berada di tengah-tengah.

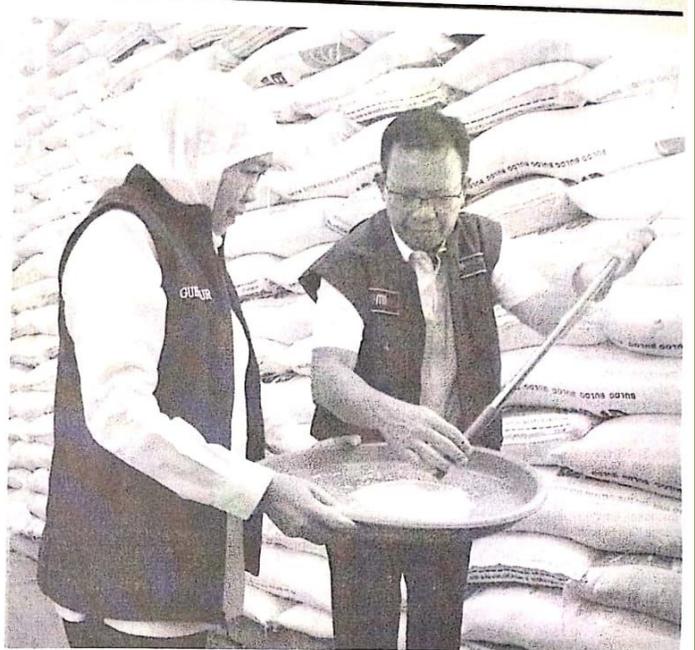
"Beras medium harganya dikisaran Rp 11.300 per kilogram. Itulah yang menyebabkan produknya yaitu beras di pasar sudah di atas HET," katanya.

Khofifah menguraikan sebenarnya terdapat 3,4 juta KPM di Jatim yang menerimanya.

Namun 200.000 KPM masih dalam proses verifikasi. Pihaknya berharap proses verifikasi dari Kementerian Sosial itu cepat selesai. Dengan begitu, mereka dapat segera menerima bantuan beras itu.

"Sesungguhnya total ada 3,4 juta KPM, tapi yang 200.000 masih dalam proses verifikasi. Mudah-mudahan bisa segera selesai sehingga mereka bisa mendapatkan hak mereka," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir menegaskan terdapat 86.720 KPM di Kabupaten Sidoarjo yang akan menerima bantuan pangan cadangan beras Provinsi Jawa Timur tahap II Tahun 2023 ini. Jumlah KPM itu, mengalami penurunan dibanding bantuan tahap pertama kemarin. Penurunannya, sekitar 5.000 KPM. Bantuan pada tahap pertama kemarin terdapat 92.000 KPM Sidoarjo yang memperolehnya. "Penerimaannya sama



BANTUAN - Bantuan pangan cadangan beras Provinsi Jawa Timur tahap II mulai disalurkan dan diluncurkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/09/2023) sore.

dengan yang kemarin. Tapi, ada penurunan karena hasil verifikasi KPM dari Kementerian Sosial," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Misbah ini berharap penyaluran bantuan pangan cadangan beras tahap

kedua kali ini berjalan lancar seperti tahap sebelumnya. Bantuan akan segera disalurkan ke setiap desa setelah diterima Kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu 86.720 KPM Sidoarjo dapat segera menikmati.

"Bantuan pangan cadangan beras tahap pertama kemarin berjalan lancar. Bahkan seratus persen tersalurkan. Mudah-mudahan penyaluran bantuan tahap kedua kali ini sama lancarnya," tandasnya. (par/wan)

memo X

APBDes Semambung Diharapkan Tembus Rp2 M



MUSRENBANG: Kegiatan Musrenbangdes di pendopo kantor balai Desa Semambung, bersama tiga anggota DPRD Sidoarjo dan meninjau jalan alternatif. (gus)

Sidoarjo, Memo X

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), usulan RKPDes Tahun 2024 Dan RKPDes Tahun 2025, Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Tahun Anggaran 2023 digelar.

Acara tersebut dihadiri Kepala Desa Semambung dan lembaga yang ada di desa tersebut serta Forkopimka Jabon. Hadir pula anggota DPRD Sidoarjo H. Bambang Pujiyanto Komisi B Fraksi Gerindra, Dr Emir Firdaus Komisi C Fraksi PAN-PPP, dan M. Rojik Komisi C Fraksi PKB, Kamis (14/09/2023) siang.

Kepala Desa Semambung Jainuri menyatakan dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa itu, dari 12 item yang menjadi berskala prioritas adalah jalan alternatif yang terletak di RW. 02, dan RW. 03. Jalan itu diusulkan lebar 4 meter

sampai 5 meter dengan panjang 600 meter.

"Jalan yang diusulkan tersebut sangat bermanfaat bagi warga maupun pengguna jalan lainnya. Terutama di sektor pertanian, sebab jalan itu berdampak dengan sawah. Akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan keberadaan jalan tersebut, seandainya warga mempunyai hajat dan menutup jalan utama, maka jalan tersebut dapat digunakan sebagai jalur alternatif. Sehingga tidak perlu memutar balik melintasi Desa Kupang, Desa Kedungrejo, maupun sebaliknya.

"Kalau dari anggaran APBDes saya kira tidak mampu, karena anggaran yang dipergunakan untuk jalur alternatif dengan

ukuran 5 meter, panjang 600 meter, serta 1 paket dengan jembatan, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp700 juta," jelasnya.

Maka perlu dukungan dari DPRD Sidoarjo dari BKK. "Harus diwujudkan bukan janji lagi, karena bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Sekali lagi jalan itu benar-benar sangat dibutuhkan, dan diperlukan. Sebab jalan itu dapat meningkatkan penghasilan para petani," tambahnya.

Sementara anggota DPRD Sidoarjo H. Bambang Pujiyanto Komisi B Fraksi Gerindra menjelaskan kegiatan Musrenbangdes ini terkait usulan RKPDes tahun 2024 dan RKPDes tahun 2025. Terdapat banyak usulan-usulan dari masyarakat Desa Semambung. Diantaranya, Penerangan Jalan Umum (PJU), jalan lingkungan dan perlu di fasilitasi. Melalui dana anggaran APBD, baik melalui dana BK atau yang lain.

"Saya berharap anggaran APBDes di Desa Semambung di Tahun 2024 nanti bisa sehat serta di Tahun 2025 juga sehat. Biar usulan masyarakat di desa tersebut, dapat terpenuhi keseluruhannya," tambahnya.

APBDes Desa Semambung di Tahun 2023 sebesar Rp1,6 miliar. Harapannya di Tahun 2024 APBDesnya naik menjadi Rp2 miliar. (gus/dar)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buka Seleksi Lagi, Isi Posisi Kepala OPD yang Kosong

KOTA-Kesempatan untuk mengisi beberapa kursi kosong pada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali terbuka. Pemkab Sidoarjo menggelar lagi seleksi penerimaan pendaftaran JPT Pratama.

Proses pengisian formasi JPT Pratama merupakan kelanjutan dari pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan pada 7 September lalu. Pasca-pelantikan, sejumlah jabatan kepala dinas kosong akibat rotasi jabatan

dan beberapa pejabat memasuki masa pensiun.

Formasi pendaftaran JPT Pratama yang terbuka melibatkan beberapa posisi strategis dalam pemerintahan. Seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar),

serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Sidoarjo Makhmud mengungkapkan, pendaftaran untuk posisi JPT Pratama dibuka sejak 9 hingga 23 September. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan seleksi administrasi.

"Pemkab menunjuk dosen Universitas Trunojoyo Tripitono Adi Prabowo sebagai ketua panitia seleksi," katanya. ● Ke Halaman 10



Buka Seleksi Lagi...

Peserta yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan tahap penilaian kompetensi manajerial dan penilaian kompetensi bidang. Tahapan tersebut akan melibatkan presentasi makalah dan wawancara teknis oleh

panitia seleksi.

Pengumuman hasil penilaian kompetensi dijadwalkan akan dilakukan pada 25 September. Selanjutnya, pada 26 September, peserta yang lolos akan menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani.

"Kemudian penetapan Kepala OPD

pada 29 September mendatang," ujar Makhmud.

Dia menyebutkan, hingga saat ini baru ada dua peserta yang menyerahkan berkas pendaftaran untuk posisi JPT Pratama.

Dalam pelantikan tersebut, beberapa pejabat eselon II mengalami per-

geseran posisi. Antara lain Fredik Suharto yang berpindah dari staf ahli Bupati menjadi Kabakesbangpol, Noer Rochmawati yang dari staf ahli Bupati menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ahmad Zaini yang sebelumnya adalah asisten administrasi menjadi staf ahli Bupati, Mustain

Baladan yang dari Kabakesbangpol menjadi staf ahli Bupati, dr. Atok Irawan dari Dirut RSUD menjadi Asisten Administrasi, M Tjarda dari Kasatpol PP menjadi Kepala Dinas Perikanan, dan Sulistianto menjadi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. (nis/vga)



Flyover Tak Ada Lahan, Ajukan Underpass untuk Gedangan

Akhir Tahun Ini Lakukan Studi Kelayakan

SIDOARJO – Perempatan Gedangan menjadi salah satu titik kemacetan di Sidoarjo. Karena itu, pemerintah pusat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi berencana membangun *flyover* di Gedangan. Namun, Pemkab Sidoarjo mengusulkan skema baru, yakni *underpass* Gedangan.

Rencana awal, *flyover* Gedangan bakal dibangun berurutan setelah pembangunan

flyover di Aloha dan *frontage road* tuntas. Dengan begitu, area kemacetan dari Waru, Gedangan, dan Buduran semakin terurai. Namun, kebutuhan anggaran untuk pembangunan *flyover* Gedangan mencapai ratusan miliar rupiah.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pada 2024 atau 2025 pihaknya mengajukan perencanaan yang baru untuk solusi mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan. Perencanaan yang lama terkait pembangunan *flyover* Gedangan, menurut dia, terlalu memakan bahu jalan. "Mengapa memakan bahu jalan? Sebab, *flyover*

butuh lahan 1,2 sampai 1,3 hektare, anggarannya gede banget," katanya. Anggaran bakal terkuras untuk pembebasan lahan. Belum lagi untuk pembangunan fisik *flyover*-nya.

Karena itu, pihaknya mencoba perencanaan baru. Pihaknya juga meminta izin ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali terkait wacana tersebut. "Kami izin karena perempatan Gedangan itu berada di jalan nasional *kan*. Nanti dibuat *underpass* yang unik," tuturnya.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya

Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Rizal Asnan mengatakan, terkait usulan tersebut, akhir tahun ini pihaknya mulai melakukan *feasibility study* (FS) atau studi kelayakan. Analisis detail, baik panjang, lebar, maupun lainnya, akan dikaji dalam FS. Termasuk detail kebutuhan anggaran pembangunannya.

Underpass rencananya tidak dibangun di Jalan Ahmad Yani atau jalan besar untuk pengendaraan dari selatan ke utara atau sebaliknya. "Rencananya nanti dibangun dari timur ke barat. Dalam waktu dekat, mulai FS-nya," kata Rizal.

Underpass akan dibangun

dari barat di depan kantor Kecamatan Gedangan di Jalan Raya Sukodono hingga ke timur atau di sisi barat perlintasan kereta api Gedangan, sebelum perempatan *frontage road* Gedangan. Namun, detailnya masih menunggu hasil FS.

Dengan solusi tersebut, diharapkan kemacetan di perempatan Gedangan yang sudah bertahun-tahun bisa terurai. Apalagi, ada dua perempatan di titik tersebut. Perempatan Gedangan di Jalan Ahmad Yani dan perempatan Gedangan *frontage road*. Beberapa kali kemacetan mengular di titik tersebut. (uzi/c7/any)



Jawa Pos

Desember, Stadion Gelora Delta Direnovasi

SIDOARJO – Revitalisasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo dimulai Desember mendatang. Targetnya, perbaikan itu tuntas pada Juni tahun depan. Stadion bakal direnovasi hingga sesuai standar dari PSSI. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Kementerian PUPR. "Anggarannya sekitar Rp 80 miliar. Dana dari APBD tidak ada," ujarnya. Pembangunan yang cukup mencolok adalah pagar mengelilingi stadion. "Pagarinya mengelilingi luar stadion, jadi nanti dibuat satu pintu," tuturnya. Artinya, pembekuan stadion

disamakan dengan stadion lain yang kualitasnya standar internasional.

"Selain itu, ada kamar ganti dan kamar mandi bagi pemain berstandar internasional," ungkapnya. Termasuk perbaikan lampu penerangan sudah cukup

(Disporapar) Sidoarjo Djoko Supriyadi mengatakan, tim survei teknis perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah datang langsung ke stadion. Kini pihaknya telah mendapatkan kepastian. "Desember pengerjaannya dimulai, insya Allah Juni sudah selesai," katanya.

Anggaran perbaikan beserta pelaksanaannya ditangani langsung oleh

nya, tembok luar stadion dibatasi dengan pagar.

Selain pagar, ada pembangunan tempat duduk penonton. "Semuanya dibuat *single seat*, baik di tribun utama maupun tribun umum," jelasnya. Dengan begitu, kapasitas tempat duduk bakal menyusut hingga sekitar 20 persen dari kapasitas 35 ribu penonton.

Djoko mengatakan, nanti juga ada perbaikan rumput stadion. Rumputnya harus

sukses cukup.

Djoko menuturkan, saat ini perencanaan detail sedang dituntaskan. Namun, dia menyebut perbaikan hanya dilakukan di stadion. Bukan di seluruh kawasan Gelora Delta. "Rehab stadion ini perintah Pak Presiden untuk mengevaluasi dan memperbaiki stadion setelah ada tragedi Kanjuruhan," katanya. Sejumlah stadion di daerah lain juga diperbaiki. (uzi/c7/any)



FIRMA ZUHDI JAWA POS

DIBIKIN LEBIH BAIK: Kondisi Stadion Gelora Delta saat ini. Pada Desember mendatang, stadion tersebut diperbaiki Kementerian PUPR. Perbaikan akan membuat kapasitas stadion menyusut.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemdes Ketimang Gelar Musrenbangdes

Sidoarjo, Memorandum

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, tahun 2024 dilaksanakan di pendopo desa setempat, Rabu (13/9) malam.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi usulan pembangunan masing-masing wilayah (Dusun, RT/RW) di desa setempat.

Program kegiatan tahunan mesti harus dilakukan, hal ini untuk memprioritaskan pembangunan fisik dan nonfisik sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Kepala Desa Ketimang II Abdul Wahab menyampaikan, musrenbangdes sebagai ruang penampung aspirasi warga untuk turut merencanakan program pembangunan desa. Selain pembangunan, musrenbangdes juga diselenggarakan untuk membahas kepentingan dan

kemajuan desa.

Musrenbangdes ini untuk diaplikasikan pelaksanaannya pada tahun 2024 mendatang. Tujuannya agar pembangunan yang menggunakan dana APBN maupun APBD tepat sasaran, sehingga masyarakat akan merasakan hasil dari program pemerintah.

Abdul Wahab menambahkan, rencana pembangunan di wilayah RT/RW hendaknya disikapi penuh tanggung jawab, baik pembangunan fisik maupun sarana lain yang dipandang perlu diprioritaskan. Musrenbangdes adalah sarana menggali informasi dari masing-masing wilayah.

Sekretaris Camat Wonoayu, Willi Raditya menjelaskan, Musrenbangdes merupakan wahana publik untuk membawa para pemangku kepentingan memahami permasalahan pembangunan di desa. Program perencanaan pembangunan harus



Warga dan Lembaga Desa Ketimang mengikuti Musrenbangdes di pendopo desa.

melalui proses Musrenbangdes dengan tujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Melalui Musrenbangdes

inilah aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya yang ada di Desa Ketimang. (zam/jok/day)

Pemdes Simpang Bagikan BLT- DD Tiga Tahap

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap 3, bulan Juli, Agustus dan September tahun anggaran 2023, di pendopo balai desa setempat, Kamis (14/9).

Pembagian BLT ini merupakan salah satu upaya pemerintah membantu perekonomian masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid - 19 lalu.

Kepala Desa Simpang, Moch Abdul Kamim mengatakan, penerima BLT-DD tahun 2023 Desa Simoang ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan dalam musyawarah antara pemdes, lembaga dan tokoh masyarakat, tentang daftar nama penerima manfaat BLT DD tahun



Pembagian BLT DD di Desa Simpang.

anggaran 2022.

"Sebanyak 50 KPM yang me-

nerima BLT DD tahap ini," ujarnya. Kamim berharap, dengan adan-

ya bantuan sebesar 300 yang dibayarkan 3 bulan sekaligus ini, dapat sedikit membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Serta dipergunakan dengan sebaik-baiknya, teruma untuk kebutuhan yang menunjang kelangsungan ekonomi dalam keluarga.

"Semoga BLT DD yang tersalur dapat dipergunakan oleh keluarga penerima manfaat dengan sebaik baiknya," tandasnya.

Dalam pelaksanaan pembagian BLT DD ini berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan dihadiri dari jajaran Forkopimka Prambon yang diwakili oleh bhabinkamtibmas dan babinsa. Warga penerima manfaat yang hadir tampak merasa senang dan terbantu dengan adanya pembagian BLT DD ini. (fin/pri/jok/day)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



BM/ST

BANGUN JEMBATAN: Pemkab Sidoarjo membangun jembatan dan talang irigasi pertanian di Semambung, Kecamatan Wonoayu untuk meningkatkan produksi pertanian demi mendukung ketahanan pangan.

Bantu Pertanian di Wonoayu, DPUBM dan SDA Bangun Jembatan dan Talang Irigasi

SIDOARJO (BM) - Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk meningkatkan produksi pertanian demi mendukung ketahanan pangan di Semambung, Kecamatan Wonoayu. Salah satunya, dengan membangun jembatan dan talang irigasi pertanian di daerah tersebut.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor mengatakan, pembangunan jembatan ini nantinya bertujuan untuk menghidupkan kembali lahan pertanian dan memperkuat konektivitas antarwilayah. "Selain dibangun jembatan, Pemkab Sidoarjo juga membangun talang irigasi sebagai pengganti pipa irigasi

yang saat kondisinya sudah tidak layak," ucapnya, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan jembatan dan pembangunan talang irigasi itu diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pertanian khususnya warga Semambung maupun sekitarnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyampaikan pihaknya mengeksekusi perencanaan pembangunan jembatan dan talang irigasi seperti yang diharapkan Bupati

"Jembatan Kali Bader ini memiliki panjang 20 meter dan lebar 4 meter. Selain jembatan nantinya juga dibuatkan talang

irigasi dengan panjang 20 meter dibangun di atas saluran air," ujar Dwi.

Kepala Desa Semambung, Naning Andiar mengatakan pembangunan jembatan Kali Bader merupakan permintaan warga kurang lebih sudah lima tahun yang lalu. "Tahun ini bisa terealisasi sesuai harapan kami," ucapnya.

Naning menjelaskan, dengan adanya pembangunan jembatan Kali Bader dapat menumbuhkan lahan pertanian kurang lebih seluas 22 hektare sebelah selatan sungai. "Nantinya jika sudah selesai, maka para petani bisa menanam padi kembali tak perlu jauh-jauh ke desa seberang," tuturnya. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembayaran PBI Belum Berdasar Data Mutakhir

SIDOARJO - Sangat disayangkan, lagi-lagi kinerja OPD di Sidoarjo kembali disoroti. Hal ini terkait bantuan iuran jaminan kesehatan yang belum berdasarkan data mutakhir. Tidak hanya itu, ditemukan juga pembayaran kepada peserta yang sudah meninggal dan pindah ditambah iuran asuransi peserta NIK tidak ditemukan dan NIK tidak aktif.

Hal ini sehingga pembayaran iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan hingga puluhan Miliar rupiah yang sudah terbayarkan yang belum dapat diyakui kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum optimal dalam berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dalam rangka verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Dr. Fenny Apridawati, S.KM.M. Kes melalui surat resmi yang diterima Rabu (13/9/23) menyebutkan, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan kewajibannya dengan mengalokasikan anggaran dan membayarkan premi iuran dan bantuan iuran setiap bulannya sesuai dengan tunjangan yang diajukan oleh BPJS cabang Sidoarjo.

"Sudah dilampiri berita ac-

pemadaman dan pemutakhiran data bukan kewenangan dari Dinas Kesehatan," demikian isi surat jawaban yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Fenny Apridawati.

Sapto Jumadi ketua LSM Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) ketua DPC Sidoarjo menyayangkan sikap Dinkes Sidoarjo dalam jawaban surat yang dikirimkan. Seharusnya Dinkes Sidoarjo bersama dinas terkait terfokus untuk memproses kelebihan pembayaran iuran PBI yang nilainya fantastis hingga ratusan juta, dan terkait hal lain hingga puluhan Miliar yang sudah dibayarkan ke BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo.

"Harusnya dilakukan Rekonsiliasi (proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi). Rekonsiliasi tersebut harus segera dilakukan untuk meminimalisir kebocoran APBD Sidoarjo," ungkap Sapto.

Saya Harap kedua dinas yakni Dinas Sosial dan Dinas DUKCAPIL tersebut tidak mencari pembenaran atas indikasi kelebihan pembayaran iuran PBI Tahun Anggaran 2021 yang sudah dibayarkan ke BPJS. Kuncinya ada pemutakhiran data, jika tidak segera dilakukan di tahun berikutnya, pasti akan timbul permasalahan yang sama yang akan membebani APBD Sidoarjo.

ara Rekonsiliasi jumlah peserta dan besaran iuran PBPB-BP yang sudah ditandatangani BPJS Kesehatan Cabang, Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Untuk verifikasi data meninggal dan penduduk pindah luar wilayah Sidoarjo dan bukan penduduk kab.Sidoarjo dalam

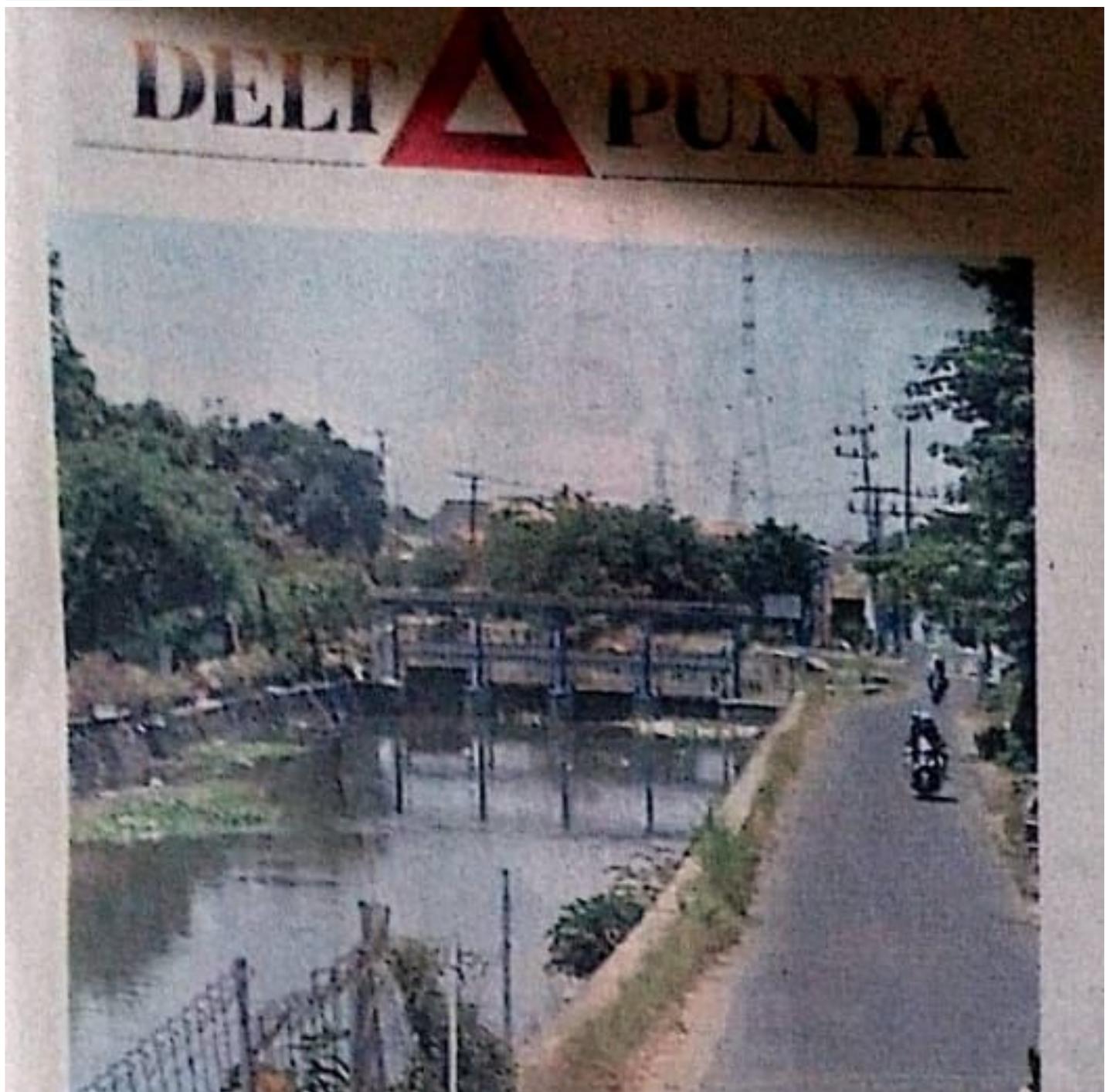
Terpisah Kepala Dinas Sosial Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan,"terkait hal dimaksud(sudah ditindaklanjuti dan diberikan tanggapan oleh inspektorat, sebaiknya koordinasi dengan inspektorat,"pungkas Misbah singkat. • Loe



LOE TI DUTA

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

DUTA





DULU BESAR: Dari dokumen milik Belanda diketahui sungai di Dusun Jrebeng, Sidomulyo, Krian, sempat digunakan sebagai pelabuhan.

AHMAD REZA/JAWA POS

Jrebeng Dulu Jadi Pelabuhan untuk Distribusi Gula

SIDOARJO - Pada masa lampau, sisi utara Krian memiliki sebuah pelabuhan untuk tempat singgah atau berlabuhnya beberapa komoditas dari sekitar Sidoarjo Barat. Itu diketahui dari berkas lama terkait masa kolonial di bekas Pabrik Gula Popoh dan Watoetoelis. Pelabuhan tersebut berada di wilayah Jrebeng, Desa Sidomulyo, Krian.

Bisa dibilang pelabuhan di Jrebeng pada masa itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai karena menjadi jalur untuk membawa hasil gula dari Watoetoelis. "Agar nantinya bisa dibawa untuk diekspor," ungkap pegiat sejarah Sidoarjo Agung Pribadi.

Dari dokumen Belanda diketahui, eksistensi Pelabuhan Jrebeng cukup besar sebelum adanya Stasiun Kedinding di Tarik yang memang digunakan untuk angkutan barang. "Sebelum tahun 1915 dari data kabarnya memang diangkut lewat jalur air melalui Jrebeng ini," katanya.

Sebenarnya selain gula, banyak komoditas lain seperti sayur serta buah-buahan yang diangkut lewat Pelabuhan Jrebeng. Seperti halnya pelabuhan masa kolonial lainnya, Jrebeng bisa dikatakan menjadi pusat perputaran ekonomi pada masa itu.

Bukti lain jika Jrebeng dahulu merupakan lokasi

pelebaran komoditas adalah adanya jalan yang bernama Pelayaran. Belum ada penemuan bukti otentik lain untuk memperkuat data dari berkas tersebut. (eza/c6/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS BIROKRASI

Sepuluh Pejabat Sidoarjo Mendaftar JPT Pratama Isi 5 Jabatan Kosong

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 10 orang pejabat di Pemkab Sidoarjo, untuk sementara, pada Kamis (14/9) sore kemarin, sudah mengirimkan pendaftaran untuk mengisi 5 posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Data sementara dari panitia seleksi, untuk posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan ada 3 pendaftar, Kepala BKD ada 3 pendaftar, Kepala Satpol PP ada 1 pendaftar, Kepala Dinas P3AKB ada 1 pendaftar, dan Kepala Disporapar ada 2 pendaftar.

Hanya saja tidak diperoleh rinci, 10 orang pejabat pendaftar tersebut, masing-masing berasal dari OPD mana saja. Plt Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, Mahkmud SH MM, menyampaikan pendaftaran telah dibuka sejak 9 September hingga sampai 23 September 2023. Pendaftaran pengisian JPT Pratama secara terbuka ini, menurut Makhmud, sesuai dengan PermenPAN nomor 15 tahun 2019.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran JPT Pratama ini adalah golongannya sudah IV a. Para pendaftar yang lolos administrasi, selanjutnya, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, akan menjalani penilaian kompetensi manajerial.

Juga akan menjalani penilaian kompetensi bidang. Yang meliputi presentasi makalah dan wawancara teknis oleh Pansel. Pengumuman hasil penilaian kompetensi, nanti akan menetapkan 3 peserta terbaik, pada 25 September 2023. Selanjutnya, pada 26 September, peserta akan menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani serta terbebas dari Nafza.

“Pejabat pembina kepegawaian atau PPK, akan menetapkan kepala OPD pada 29 September 2023,” kata Mahmud. Pengisian formasi JPT Pratama di Kabupaten Sidoarjo ini, menindaklanjuti proses pelantikan pejabat eselon II, yang sudah dilakukan pada Kamis, 7 September 2023, di pendopo Delta Wibawa, oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. [kus.dre]

Pemkab Bantu UMKM Naik Kelas Lewat SDC

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) setempat, membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas salah satunya melalui Skill Development Center (SDC) yang diikuti oleh 32 orang peserta.

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman di Surabaya, Selasa mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas berkarakter.

"Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mengoptimalkan sumber daya manusia guna menggerakkan perekonomian lokal serta memperluas penciptaan lapangan kerja," katanya di sela pembukaan

lokakarya di salah satu hotel di Surabaya.

Ia mengatakan, ada beberapa strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM, salah satunya memberikan stimulus untuk menumbuhkan dunia usaha guna memperluas lapangan kerja dan dapat menurunkan jumlah pengangguran. "Hal ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam rangka peningkatan produktivitas," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo juga merancang strategi dan kebijakan yang mendorong UMKM naik kelas mulai dari tingkat keluarga hingga negara. "Kemudian memberikan informasi sekaligus pengetahuan kepada seluruh peserta sesuai bidang yang mereka tekuni

dan bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas berkarakter dan berdaya saing" tuturnya.

Kepala BPVP Sidoarjo Muhammad Aiza Akbar mengatakan SDC ini merupakan sebuah terobosan bersama melalui kolaborasi antarinstansi untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja. "Baik bekerja dalam hubungan kerja maupun bekerja sebagai pemilik usaha," ucapnya.

Ia mengatakan, SDC Kabupaten Sidoarjo ini memilih untuk menciptakan wirausaha baru karena dengan menciptakan wirausaha baru, maka akan menciptakan multiplier effect dengan terserapnya tenaga kerja pada usaha-usaha baru tersebut.

"SDC Kabupaten Sidoarjo ini tidak hanya menyelenggarakan pelatihan saja, namun selain membekali peserta pelatihan ini dengan teknik bidang usaha makanan-minuman serta usaha konveksi, juga membekali peserta dengan bidang pengemasan, desain produk, penguasaan ekosistem digital dan e-commerce serta membangun ekosistem baik fisik maupun digital bagi para peserta pelatihan," ucapnya.

Selain itu, juga memberikan pembekalan legalitas usaha. Sehingga hasil pelatihan SDC ini, adalah unit-unit usaha baru yang telah siap dari sisi kemampuan teknis, legalitas usaha, serta siap memanfaatkan peluang besar dari system e-commerce.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pameran hasil pelatihan SDC Sidoarjo yang berupa produk-produk UKM hasil pelatihan SDC, juga diinfokan juga unit usaha serta akun e-commerce yang dimilikinya. Sehingga, setelah pelatihan SDC ini, para pelaku UMKM mampu menjadi wirausaha yang lebih siap, lebih maju serta telah tergabung dalam komunitas dan ekosistem digital. "Sehingga, siap bersaing dalam hal kualitas serta mampu memanfaatkan peluang dari ekosistem digital yang tanpa batas," ujarnya. (udi)



BM/ST

BANTU UMKM: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas setempat membantu pelaku UMKM naik kelas salah satunya melalui Skill Development Center yang diikuti oleh 32 orang peserta.